

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENGENAI PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG

Indratma Sarwahita, Ari Subowo

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The issue of plastic waste in Semarang City has shown a continuous increase along with population growth, economic activities, and the high consumption of single-use plastic products. This condition encouraged the Semarang City Government to establish Mayor Regulation of Semarang City Number 27 of 2019 on the Control of Plastic Use as a policy instrument aimed at reducing plastic waste generation and maintaining environmental balance. This study aims to analyze the implementation of the plastic use control policy in Semarang City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with informants selected using purposive sampling. The analysis is based on George C. Edward III's policy implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of Mayor Regulation Number 27 of 2019 has not been fully optimized. The main obstacles include ineffective policy socialization to the public and business actors, limited human resources and supporting facilities, weak consistency in supervision and enforcement of sanctions, and suboptimal coordination among regional government agencies. Nevertheless, several supporting factors were identified, such as the commitment of the local government, the clarity of the regulatory framework, and the increasing awareness of some community members and business actors regarding the importance of reducing plastic use. Based on these findings, this study recommends strengthening continuous and participatory policy socialization, improving the capacity of implementing officials, providing environmentally friendly alternatives to plastic products, and enhancing supervision as well as consistent enforcement of sanctions. These efforts are expected to improve the effectiveness of policy implementation and contribute to achieving environmental balance and sustainable development in Semarang City.

Keywords: *Implementation, Control of Plastic Use, Semarang City*

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik di Kota Semarang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta tingginya pola konsumsi plastik sekali pakai. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik sebagai instrumen kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Analisis penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 belum terlaksana secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi belum efektifnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana pendukung, lemahnya konsistensi pengawasan dan penegakan sanksi, serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang belum berjalan maksimal. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah, kejelasan regulasi, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pengurangan penggunaan plastik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur pelaksana, penyediaan alternatif pengganti plastik yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan penegakan sanksi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan mendukung terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup di Kota Semarang.

Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian Penggunaan Plastik, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika pertumbuhan penduduk global telah membawa konsekuensi logis terhadap tekanan lingkungan hidup. Pada tahun 2024, populasi dunia tercatat mencapai 8,16 miliar jiwa, di mana Indonesia berkontribusi signifikan sebagai negara terpadat keempat dengan 283,49 juta jiwa. Tingginya densitas populasi ini berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah, khususnya sampah plastik yang menjadi residu dari pola konsumsi masyarakat modern. Plastik, yang awalnya diciptakan untuk kepraktisan karena sifatnya yang ringan dan murah, kini bermetamorfosis menjadi ancaman ekologis serius karena sifatnya yang non-biodegradable atau sulit terurai oleh mikroorganisme.

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa produksi sampah nasional mencapai 68,5 juta ton per tahun, dengan komposisi sampah plastik mencapai 17%. Jika tidak ditangani, akumulasi ini berpotensi merusak ekosistem darat dan laut, serta memperburuk perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses dekomposisi maupun pembakaran terbuka.

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), tidak luput dari permasalahan ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2024), Kota Semarang tercatat sebagai penghasil sampah tertinggi di Jawa Tengah. Timbulan sampah harian kota ini mencapai angka 1.229 ton, di mana sekitar 13% di antaranya adalah sampah plastik.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa TPA Jatibarang menerima beban sampah sekitar 1.071 ton setiap harinya, mendekati ambang batas kapasitas maksimal (overload).

Permasalahan sampah di Kota Semarang bukan sekadar isu kebersihan, melainkan telah menjadi masalah kultural dan struktural. Pola konsumsi masyarakat yang masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai (kantong kresek, sedotan, styrofoam) memperburuk keadaan. Sebagai respons terhadap krisis ini, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum untuk menekan volume limbah dari sumbernya, mengubah perilaku masyarakat, dan mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Namun, keberadaan regulasi an sich tidak menjamin keberhasilan di lapangan. Observasi awal menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara harapan kebijakan dengan realitas implementasi. Beberapa indikator masalah yang muncul antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, belum memadainya fasilitas sarana prasarana pendukung, serta sosialisasi yang dinilai kurang optimal dan tidak merata. Ketidaksinkronan ini menarik untuk dikaji lebih dalam melalui perspektif administrasi publik, khususnya studi implementasi kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 ditinjau dari

aspek ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses? .

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut? .

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang serta mengidentifikasi determinan yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya, guna memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah kota .

Kajian Teori

a. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Administrasi publik secara luas didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai tujuan negara. Nicholas Henry menggambarkan administrasi publik sebagai perpaduan kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan meningkatkan respons kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial. Dalam konteks penelitian ini, administrasi publik menjadi payung besar yang menaungi proses pengelolaan sampah sebagai bagian dari pelayanan publik.

Kebijakan publik, menurut Carl J. Friedrich, adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan. Solichin Abdul Wahab menekankan bahwa kebijakan harus dibedakan dari sekadar keputusan; kebijakan mencakup perilaku, harapan, dan hasil akhir yang ingin dicapai .

b. Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama untuk membedah masalah:

1. Model Lima Ketepatan (Riant Nugroho)

Riant Nugroho menegaskan bahwa 60% keberhasilan perencanaan kebijakan terletak pada tahap implementasi. Ia merumuskan lima dimensi untuk mengukur efektivitas implementasi:

2. **Ketepatan Kebijakan:** Akurasi kebijakan dalam menjawab masalah publik.
3. **Ketepatan Pelaksana:** Kompetensi dan koordinasi aktor pelaksana.
4. **Ketepatan Target:** Kesesuaian intervensi dengan karakteristik kelompok sasaran.
5. **Ketepatan Lingkungan:** Dukungan lingkungan internal dan eksternal kebijakan.
6. **Ketepatan Proses:** Kesesuaian tahapan pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan.

Model Determinan Implementasi (George C. Edwards III). Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat, digunakan teori Edwards III yang mengidentifikasi empat variabel kritis:

1. **Komunikasi:** Transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi pesan kebijakan kepada pelaksana dan sasaran .
2. **Sumber Daya (Resources):** Ketersediaan staf, anggaran, fasilitas, dan wewenang.
3. **Disposisi:** Sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi: Mekanisme kerja, koordinasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

c. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian ini menawarkan kebaruan dibandingkan studi terdahulu. Berbeda dengan penelitian Murdyansyah et al. (2023) yang berfokus di Jepara, penelitian ini mengambil lokus di Kota Semarang dengan karakteristik metropolitan yang kompleks. Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian Normajatun (2020) di Banjarmasin atau Salsabila (2023) di Surabaya yang spesifik pada "kantong plastik", penelitian ini memiliki cakupan lebih luas yaitu "Pengendalian Penggunaan Plastik" yang mencakup pipet dan styrofoam, serta mengaitkannya dengan "Keseimbangan Lingkungan Hidup" sebagai dampak jangka panjang.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (1980:148) dalam Winarno (2016), terdapat empat indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.:

1. Komunikasi

Komunikasi mengacu pada proses penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran dan masyarakat luas, serta melibatkan tanggapan dan tindakan para aktor yang

terlibat. Faktor ini dianggap berjalan efektif apabila para pelaksana memahami secara menyeluruh maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam konteks organisasi, komunikasi merupakan proses yang kompleks, dan kegagalan dalam menyampaikan informasi secara memadai dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Komunikasi sendiri memiliki beberapa dimensi penting, yaitu transmisi (penyampaian pesan), kejelasan isi pesan, dan konsistensi dalam penyampaian.

2. Sumber Daya

Sumber daya meliputi berbagai komponen yang menunjang pelaksanaan kebijakan, seperti jumlah tenaga kerja, tingkat pengalaman staf pelaksana, kewenangan formal yang memungkinkan jalannya program, ketersediaan fasilitas pendukung, pendanaan yang memadai, sarana fisik, serta informasi yang relevan. Dengan kata lain, sumber daya mencakup aspek manusia, keuangan, infrastruktur, dan informasi yang saling terintegrasi dalam mendukung jalannya kebijakan publik.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada kesediaan dan komitmen individu atau kelompok pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Respons terhadap kebijakan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: tingkat pemahaman, kesediaan mengikuti arahan, serta intensitas dukungan atau penolakan. Beberapa hal yang mempengaruhi disposisi antara lain proses rekrutmen birokrasi

dan pemberian insentif yang dapat memotivasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi dan tata kelola institusi yang menjadi pelaksana kebijakan publik. Salah satu tantangan utama dalam birokrasi adalah menghindari terjadinya fragmentasi, yang dapat melemahkan efektivitas implementasi. Koordinasi lintas unit sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan para manajer memahami peran serta Langkah yang harus diambil. Dua karakteristik utama dari birokrasi dalam konteks ini adalah keberadaan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan potensi terjadinya fragmentasi kelembagaan.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami makna di balik fenomena, mendeskripsikan proses implementasi secara mendalam, dan menginterpretasi data verbal dari para aktor kebijakan.

2. Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian ditetapkan di Kota Semarang, dengan pusat pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang serta berbagai titik aktivitas ekonomi (ritel dan pasar). Fokus penelitian terbagi dua: analisis implementasi

kebijakan dan analisis infrastruktur pendukung kebijakan.

3. Subjek dan Sumber Data

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk informan kunci (pejabat berwenang) dan snowball sampling untuk memperluas data lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah).
- b. Pelaku Usaha Ritel (Perwakilan manajemen Alfamart).
- c. Masyarakat umum (konsumen dan warga terdampak).

Sumber data terdiri dari:

- a. Data Primer: Hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan.
- b. Data Sekunder: Dokumen Perwali, data statistik BPS, laporan kinerja DLH, dan literatur relevan.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data (pemilahan data penting), penyajian data (naratif sistematis), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

5. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Data

yang diperoleh dari pemerintah (DLH) dikonfrontasi dengan data dari pelaku usaha dan masyarakat untuk melihat konsistensi dan meminimalisir bias subjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Lima Ketepatan Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan Kebijakan (Right Policy)

Ketepatan kebijakan menilai sejauh mana substansi kebijakan mampu memecahkan masalah publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH, Perwali 27/2019 lahir dari urgensi nyata: volume sampah plastik yang terus meningkat dan membebani TPA Jatibarang.

"Kalau melihat latar belakangnya, Perwali ini muncul karena volume sampah plastik di Kota Semarang terus meningkat... Plastik sekali pakai itu paling banyak ditemukan di TPS maupun TPA Jatibarang... Kebijakan ini penting karena masalah kantong plastik itu tidak bisa dibiarkan." (Informan DLH, 16 Oktober 2025).

Kebijakan ini secara spesifik melarang tiga jenis plastik: kantong plastik, pipet plastik, dan styrofoam. Pemilihan tiga item ini dinilai tepat sasaran (right policy) karena berdasarkan survei, ketiganya adalah penyumbang sampah terbesar yang sulit terurai. Namun, dari sisi masyarakat, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya tepat secara ekonomis dan praktis.

"Tapi buat kami sebagian masyarakat dan pedagang kecil, kadang terasa belum nyambung sama kondisi kami... Kadang belum ada pengganti yang murah atau gampang dicari, jadi rasanya belum pas-pas banget." (Informan Masyarakat, 3 November 2025).

Analisis ini menunjukkan bahwa secara ekologis kebijakan ini sangat tepat, namun terdapat celah ketepatan sosiologis di mana kesiapan masyarakat bawah belum terakomodasi sepenuhnya.

2. Ketepatan Pelaksana (Right Executor)

Pelaksana kebijakan meliputi Wali Kota sebagai penentu arah dan DLH sebagai eksekutor teknis, dibantu dinas terkait. Secara struktur, pembagian tugas sudah jelas dan diatur dalam Pasal 3 Perwali. Namun, terdapat kendala kapasitas pada pelaksana pemerintah.

"Terus terang kami masih punya keterbatasan, terutama dari sisi anggaran dan jumlah personel. Idealnya memang pengawasan bisa dilakukan lebih sering ke semua pelaku usaha, tapi dengan sumber daya yang ada, kami harus mengatur prioritas dulu." (Informan DLH, 16 Oktober 2025).

Sebaliknya, ketepatan pelaksana di sektor swasta (ritel modern) sangat tinggi. Alfamart, misalnya, memiliki kepatuhan internal yang kuat karena adanya instruksi perusahaan yang jelas.

"Kami sudah memahami kewajiban tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Komunikasi di internal perusahaan juga jelas... Prosedur kerja sudah ada, tinggal dijalankan." (Informan Ritel, 24 November 2025).

3. Ketepatan Target (Right Target)

Target kebijakan adalah pelaku usaha (toko, restoran, warung) dan masyarakat. Penelitian menemukan disparitas capaian target. Target Ritel Modern: Tercapai dengan baik. Ritel besar patuh dan menjalankan prosedur. Target UMKM & Pasar Tradisional: Belum optimal. Banyak pedagang pasar yang masih menggunakan plastik karena alasan biaya.

"Masalah utama adalah ketersediaan dan biaya. Kantong atau kemasan ramah lingkungan masih lebih mahal... Pelaku usaha kecil juga membutuhkan waktu dan pendampingan untuk mencari alternatif..." (Informan DLH, 16 Oktober 2025).

Masyarakat juga menunjukkan respons beragam. Masyarakat yang berbelanja di ritel modern cenderung lebih patuh membawa tas belanja, sedangkan di pasar tradisional kepatuhan masih rendah.

4. Ketepatan Lingkungan (Right Environment)

Lingkungan kebijakan mencakup dukungan politik, sosial, dan ekonomi. Secara politik dan kelembagaan, lingkungan sangat mendukung dengan adanya koordinasi lintas dinas dan pembentukan infrastruktur pendukung seperti 664 Bank Sampah dan 19 TPS 3R pada tahun 2024.

Namun, lingkungan sosial-ekonomi masyarakat menengah ke bawah menjadi tantangan. Persepsi bahwa kebijakan ini "merepotkan" dan "mahal" masih kuat.

"Orang masih terbiasa pakai plastik, karena praktis dan murah. Kalau harus beli kantong lain kadang mahal, jadi banyak yang belum siap." (Informan Masyarakat, 3 November 2025).

5. Ketepatan Proses (Right Process)

Proses implementasi mencakup sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi. Temuan menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan secara intensif di awal (7-8 kali/tahun), namun menurun drastis di tahun-tahun berikutnya (2-3 kali/tahun). Proses ini dinilai tidak merata; informasi hanya sampai ke pelaku usaha besar, sementara pedagang kecil sering terlewat.

"Banyak yang hanya mendengar dari teman atau toko, jadi tingkat pemahaman berbeda-beda." (Informan Masyarakat, 3 November 2025).

Terkait penegakan aturan, pemerintah lebih memilih pendekatan persuasif (binaan) daripada sanksi tegas, yang menyebabkan efek jera kurang terasa.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat (Teori George C. Edwards III)

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi kebijakan menjadi faktor kunci.

Faktor Pendukung:
Penggunaan berbagai saluran media (cetak, medsos, workshop) oleh DLH cukup masif di awal. Komunikasi internal di jaringan ritel modern sangat efektif dan terstruktur.

Faktor Penghambat: Terjadi distorsi dan ketidakmerataan informasi. Pesan kebijakan tidak sampai secara utuh ke pedagang pasar tradisional. Ketidakkonsistenan pesan menyebabkan kebingungan di masyarakat mengenai detail aturan (jenis apa yang boleh/tidak).

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya adalah hambatan paling signifikan dalam implementasi ini.

Faktor Penghambat: Kekurangan staf pengawas di DLH menyebabkan monitoring hanya bisa dilakukan di pusat kota/ritel besar, mengabaikan wilayah pinggiran dan pasar tradisional. Anggaran terbatas menghambat penyediaan fasilitas edukasi dan subsidi kantong alternatif.

Faktor Pendukung: Dukungan sumber daya dari sektor swasta (ritel menyediakan tas kain berbayar) dan partisipasi komunitas lingkungan membantu mengisi kekosongan peran pemerintah.

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi merujuk pada sikap para pelaksana.

Faktor Pendukung: Komitmen birokrasi (DLH) sangat tinggi; mereka memahami urgensi lingkungan. Ritel modern

menunjukkan disposisi positif dan kooperatif.

Faktor Penghambat: Disposisi masyarakat bersifat situasional dan pragmatis. Kepatuhan muncul jika "mudah dilakukan", namun jika dirasa "ribet" atau mahal, mereka kembali ke kebiasaan lama. Ada resistensi pasif dari pedagang kecil karena alasan ekonomi.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Faktor Pendukung: Telah tersedia SOP yang jelas dan landasan hukum (Perwali) yang kuat. Pembagian tugas antara regulator dan eksekutor sudah terdefinisi.

Faktor Penghambat: Masih terjadi fragmentasi koordinasi di lapangan. Sinergi antara berbagai dinas (DLH, Perdagangan, Satpol PP) kadang tidak konsisten, menyebabkan penegakan aturan yang "bolong-bolong".

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis:

Status Implementasi: Implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 telah berjalan namun belum mencapai titik optimal. Kebijakan ini berhasil mengubah wajah ritel modern menjadi bebas plastik, namun gagal menembus benteng kebiasaan di pasar tradisional dan UMKM.

Gap Ketepatan: Terdapat kesenjangan pada Ketepatan Target dan Ketepatan Proses. Kebijakan ini tepat secara konsep, namun eksekusinya bias kelas (lebih efektif pada kelas menengah atas/ritel modern).

Faktor Determinan:

Faktor pendorong utama adalah komitmen pemerintah daerah dan kepatuhan sektor swasta formal.

Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran), komunikasi yang tidak inklusif, dan ketiadaan insentif ekonomi bagi masyarakat bawah untuk beralih ke produk ramah lingkungan.

b. Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

Revitalisasi Sosialisasi: Mengubah strategi komunikasi dari sekadar "himbauan" menjadi pendekatan partisipatif yang menjangkau pasar tradisional dan paguyuban pedagang.

Intervensi Ekonomi: Pemerintah perlu menyediakan subsidi atau memfasilitasi akses terhadap kantong belanja ramah lingkungan yang murah bagi UMKM, agar hambatan biaya dapat diatasi.

Penguatan Pengawasan: Menambah alokasi anggaran untuk rekrutmen tenaga pengawas lapangan atau membentuk Satgas Anti-Plastik lintas sektoral untuk

memastikan aturan ditegakkan secara merata.

Penegakan Sanksi Bertingkat: Menerapkan sanksi administratif secara bertahap namun tegas kepada pelanggar berulang, untuk menciptakan efek jera dan wibawa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, G. L. (2022). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 254–268.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37117%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/37117/28294>
- Blolo, Y. K. (2021). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. *Sorot*, 16(1), 13.
<https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.13-24>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Henry, N. (1995). *Public Administrator and Public Affairs* (6th ed.). N.J: Prentice Hall.
- Herman, M., Prakoso, M. A., & Windusancono, B. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Bisnis Retail Di Kabupaten Jepara FISIP Untag Semarang Universitas

17 Agustus 1945 Semarang Diagram 1 :
Komposisi Timbulan Sampah di
Setiap Provinsi di Indonesia 2022. 20(2).

Islami, S. S., Purnamasari, I., Seran, G. G.,
Tol, J., No, C., & Pos, K. (2020).

Implementasi Kebijakan Peraturan Wali
Kota Bogor Kantong Plastik Di

Kota Bogor Policy Implementation of
Bogor Mayor Regulation No . 61 /

2018 Regarding Reduction of Using Plastic
Bags in Bogor City. Ural

GOVERNANSI, 6(1), 1–8.

Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi
Strategis Administrasi Publik. Gava
Media.

Mawardani, S., & Lukman Arif. (2023).
Program Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom
Kota Surabaya Dalam Pandangan

Implementasi Kebijakan. Journal
Publicuho, 6(2), 560–567.

<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.158>

Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik:
Implementasi dan Pengendalian
Kebijakan.

Elex Media Komputindo.

Normajatun, N., & Haliq, A. (2020).
Kebijakan Pemerintah Tentang
Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar
Tradisional Kota Banjarmasin.
ASSIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, 5(2), 55–63.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3517>

Novela Lestari, N. L., & As'ari, H. (2022).
Implementasi Kebijakan Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten

Siak. PUBLIKA : Jurnal Ilmu

Administrasi Publik, 8(1), 43–58.

[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9213](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213)